

Urgensi Badan Regulasi Metrologi terhadap Perlindungan Konsumen

Jawa Timur

Disampaikan :
Di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur
Tanggal 11 Februari 2005



Keberadaan Lembaga Kalibrasi /
Metrologi / Jawatan Tera

- C. Dinas Kesehatan;
- D. Kalibrasi internal perusahaan/lembaga



4. Timbangan roda kilogram/kwintal;
5. Alat ukur SPBU: BBM dan Gas Elpiji;
6. Argometer Taxi (Dinas Perhubungan).

Masalahnya :

Ada Badan Metrologi & Koperasi Metrologi, dampaknya terjadi ukuran ganda.



5. Alat uji gas emisi (belum jelas);
6. Alat kendali polusi di jalan raya (belum jelas).

Masalahnya :

Pengawasan masih ada di bawah Ditjen Perhubungan di Departemen Perhubungan



1. Laboratorium kesehatan:

5. Timbangan anak;

Masalahnya :

Tumpang tindih antara BPFK (Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan) dengan institusi Rumah Sakit yang memiliki lembaga kalibrasi sendiri.



Masalahnya :

Belum ada lembaga independen yang mengawasi dan menguji kekuatan dan akurasi ukurannya.



dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan,

Ayat (b) tidak sesuai dengan berat bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,

Ayat (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.



Masalahnya :

Kita bisa menggunakan standard Indonesia jika peralatan uji itu hasil produksi Indonesia dan hanya dibolehkan untuk konsumsi nasional.



1. UU Perlindungan Konsumen belum dijadikan koreksikan dalam

produk peraturan yang berhubungan dengan publik,

3. Belum optimalnya lembaga Metrologi yang sudah ada karena keterbatasan personil, peralatan uji di lapangan dan tumpang tindih antar instansi dan lembaga terkait.
4. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-hak normatifnya seperti yang diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen.
5. Kuatnya manajemen yang seringkali mengalahkan sistem yang telah mengaturnya.



perlindungan konsumen;

- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



bidangnya dan keberadaannya perlu devaluasi setiap tahun karena pertumbuhan teknologi dan tren masyarakat mengalami perubahan dengan cepat.

- Badan ini perlu didukung dengan peralatan yang memadai dan sumber dana yang mencukupi. Karena yang terakhir ini seringkali menjadi kendala operasionalnya.



Terima

Kasih

